



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

JL. Tugu No.1 Fax. (0341) – 328553 / Telp. (0341) – 326 025, 366 955,
360 975, 328 553, 343 894
M A L A N G

Kode Pos 65119

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 010/ 280 /PPK.BPKAD/2015

TENTANG

PENYEDIAAN TENAGA TEKNIS UNTUK OPERASIONAL DATA PETA ASET
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan September tahun Dua ribu lima belas (01-09-2015) yang bertanda tangan di bawah ini :

1 N a m a	:	S E T I J O K O, SE.
NIP	:	19620611 198703 1 014
Jabatan	:	Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

Bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, sesuai Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 188.48/10/35.73.408/2015 tanggal 7 Januari 2015, yang berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu** ;

2 N a m a	:	DANNY WIDYA PRAMANTA, SE
Tempat, tgl lahir	:	Malang, 24 Desember 1989
Alamat	:	Jl. Candi Mendut VI/6 Malang
No. KTP	:	3573052412890001

Bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua**, yang selanjutnya disebut bersama sebagai pihak setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dengan Petugas Teknis Peta Gambar Data Aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. **Pihak Kesatu** memerintahkan **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** menyatakan menerima pekerjaan survey dan operasional Data Peta Aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
PENDAHULUAN

Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat-syarat surat perjanjian di bawah ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) **Pihak Kesatu** karena jabatannya memberikan penugasan kepada **Pihak Kedua** untuk melaksanakan tugas/pekerjaan Operator Aplikasi Data Peta Aset Tanah yang dilaksanakan Bidang Penatausahaan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Jalan Tugu No. 1 Malang yang meliputi pemetaan di wilayah, pengukuran dan selanjutnya menuangkan dalam gambar peta aplikasi SIGMA dan SIIPT.

- (2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh **Pihak Kesatu** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3
HAK

- (1) **Pihak Kesatu** berhak menerima pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sampai dengan diterima baik oleh **Pihak Kesatu**.
- (2) **Pihak Kedua** tidak berhak menuntut menjadi Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak yang berlaku bagi Pegawai Negeri sipil;
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas honorarium dari **Pihak Kesatu** setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan;
- (4) **Pihak Kedua** berhak memperoleh fasilitas berupa alat dan bahan yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan **Pihak Kedua** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh **Pihak Kesatu**.

Pasal 4
KEWAJIBAN MASING-MASING

- (1) **Pihak Kesatu** berkewajiban menyediakan fasilitas berupa alat dan bahan yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pihak Kedua sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh **Pihak kesatu**;
- (2) **Pihak Kesatu** berkewajiban membayar kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan;
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan, pekerjaan sebagaimana Pasal 2 Perjanjian ini secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab, sampai diterima dengan baik oleh **Pihak Kesatu**;
- (4) **Pihak Kedua** berkewajiban mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan kegiatan yang diselenggarakan **Pihak Kesatu**;
- (5) **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang diberikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dan memahami tugas diluar jam kerja yang telah ditentukan/diberlakukan oleh **Pihak Kesatu**;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan upah/ongkos non PNS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2015.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku dan mengikat kedua belah Pihak sejak ditanda tanganinya Surat Perjanjian Kerja ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan gugur apabila Pihak Kedua :

- (1) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- (2) Meninggal Dunia;
- (3) Tidak Masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan yang sah, keterangan yang sah dimaksud adalah Surat Keterangan dari dokter atau pribadi;
- (4) Tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah;

- (5) Dengan sengaja dan atau tidak sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam sangsi pidana penjara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- (6) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak memungkinkan, maka **Pihak Kesatu** dapat memberhentikan dengan hormat **Pihak Kedua**.

Pasal 8
PEMBINAAN

- (1) Pembinaan terhadap **Pihak Kedua** yang melakukan kesalahan/pelanggaran oleh **Pihak Kesatu**;
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah pemberian surat pernyataan I sekaligus terakhir
- (3) Apabila **Pihak Kesatu** mendapat surat peringatan dan melakukan kesalahan/pelanggaran lagi maka **Pihak Kesatu** dapat membatalkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah maka Para Pihak memilih tempat kediamaan (domisili) yang tetap yaitu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di jalan Jendral A. Yani Utara Nomor 198 Malang.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Pihak Kedua



DANNY WIDYA PRAMANTA, SE

Pihak Kesatu

